

KOORDINASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Fernando Fajar

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : fernandofajar89@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi koordinasi yang efektif tentang koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa di Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dalam hubungan kerja tidak harmonis antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa terutama dalam penetapan APBDes di Kabupaten Landak yang masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan teori koordinasi "Tripathi dan Reddy". Penelitian ini dilakukan 3 tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian di Desa Sidas. Subjek penelitian adalah Kepala Desa beserta Peran kat Desa dan ketua BPD beserta anggotanya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya koordinasi karena kurangnya komunikasi dan lemahnya kepemimpinan antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa. Untuk itu rekomendasi dalam mengefektifkan koordinasi adalah mengintensifkan komunikasi dan perlu mengikuti diklat kepemimpinan.

Kata Kunci: Koordinasi, Komunikasi dan Kepemimpinan.

Abstract

This script intend to bring the effective coordination between the head of villag and BPD in the rural development at Landak Regency. The title of this script based by the issues of the relation between the head of village and BPD th t can not harmonious especially in the establishment of APBDes at Landak Regency still can not be optimal. This research use qualitative research model by using the theory of coordination "Tripathi and Reddy". This research do 3 stages of analysis, namely data reduction, data display and drawing conclusions and verification. Research sites is in Sidas Village. The subjects is the head of village chief and the chairman of the village along with The BPD with its members. The conclusion of this research is the coordnation still can not be optimal because lack of communication between the head of the vill ge and BPD in rural development. For that, recom endation to makemore effective coordination is to increase the intensiveness of the communication and necessary to follow the leadership training.

Keywords: Coordination, Communication and Leadership.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Hal ini menguatkan posisi daerah dalam meningkatkan kemampuan di segala aspek, terutama pengelolaan daerah sepenuhnya di serahkan kepada daerah untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus siap dan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang kondusif agar tercipta pembangunan. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan yang terarah dan berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan dapat berhasil dan berdaya guna. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, membangkitkan kreativitas dan partisipasi masyarakat itu sendiri guna meningkatkan pemanfaatan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam praktek otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Pemerintahan desa merupakan aktivitas pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada dasarnya, Pemerintah desa merupakan sebuah lembaga eksekutif desa dan BPD sendiri sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri

Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Bersama perangkat desa, Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa memiliki peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah membina dan memelihara kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan serta harus mampu merangkul dan menggandeng masyarakatnya.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 209, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Desa merupakan jenjang pemerintahan yang paling bawah yang memiliki hak otonomi. Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa. Sedangkan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat Desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Penyelenggaraan pembangunan desa memerlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat. Pembangunan baru dapat dianggap sebagai pembangunan yang sesungguhnya, kalau terdapat pemerataan dalam kegiatan, tanggung jawab dan hasil dan pembangunan itu (Abidin, 2002: 25).

Pembangunan Desa yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Di dalam melakukan proses pembangunan antara Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa, harus mampu merangkul atau melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan atau program desa perlu dilakukan agar pemahaman dan kesadaran masyarakat menjadi lebih mengikat lagi sehingga

sikap apatis terhadap program yang diselenggarakan pemerintah desa dapat berhasil dan tepat sasaran.

Menurut pengamatan peneliti di lapangan, banyak permasalahan yang timbul, pola hubungan kesejajaran dan kemitraan antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sidas masih belum optimal. Praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan adanya kecenderungan dominasi Kepala Desa dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan lemahnya kepemimpinan dari kedua lembaga ini masih dan kesalahan persepsi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga BPD dan Kepala Desa kurang memahami tupoksinya masing-masing.

Ketidakharmonisan antara BPD dengan Kepala Desa terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Sidas dalam proses-proses tersebut, terlihat adanya ketergantungan dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD di Desa Sidas hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan perbedaan antara BPD dengan Kepala Desa. Lemahnya komunikasi dan koordinasi menyebabkan kedua lembaga ini seakan berjalan sendiri-sendiri sehingga berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Dampak dari lemahnya koordinasi tersebut terlihat dengan proses pembangunan yang ada di

desa Sidas. Komunikasi yang terjadi antara kedua lembaga ini kurang berjalan efektif sehingga pembangunan yang terlaksana tidak optimal. Pembangunan melalui program-program yang dilakukan sering sekali bertentangan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu program yang dinilai belum optimal adalah pembangunan sumur air bersih di dusun Tebing Tinggi. Pada kenyataannya masyarakat di dusun tersebut kurang membutuhkan sumur air bersih sehingga sumur yang telah dibangun tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja.

Kasus pembangunan jalan antar kampung di dusun Sempang Pasir dan Tebing Tinggi. Dalam kasus ini, masyarakat selaku pemilik lahan merasa dirugikan dan proses pengerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemborong, masyarakat dengan pemerintah desa terjadi perselisihan yang berujung pada konflik atau perkelahian. Hal ini menindikasikan lemahnya koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa, lemahnya koordinasi tersebut menghasilkan pembanguan yang sia-sia dan tentu saja akan sangat merugikan desa itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan disemua sektor diperlukan koordinasi dan kesungguhan serta komitmen bersama antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul :
Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Fernando Fajar

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :
“Bagaimana koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak ?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam kajian Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang konstruktif kepada Kabupaten Landak khususnya Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila agar koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) antar lembaga berjalan dengan baik.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Gulick (dalam Handoko, 2003:11) mendefinisikan “ manajemen sebagai suatu bidang

ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan”.

Menurut H. Koontz dan O’Donnel (dalam Handayani, 1984:19) “manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Menurut Brown (dalam Moekijat, 1994:17) “fungsi-fungsi manajemen adalah *planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling*”. Sedangkan Brech (dalam Moekijat, 1994:17) berpendapat bahwa “fungsi manajemen adalah *planning, co-ordination, inspiration or motivation, dan control or checking*”.

Manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, tanpa manajemen pencapaian tujuan organisasi akan lebih sulit. Menurut Handoko (2003:6), ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu: 1) untuk mencapai tujuan; 2) untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan; dan 3) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Pengkoordinasian merupakan bagian yang penting dari semua fungsi manajemen. Koordinasi merupakan suatu upaya penyesuaian atau penyeragaman bagian-bagian yang berbeda agar saling terkait guna pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan. Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai “proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”.

Menurut Terry (dalam Moekijat: 1994) “koordinasi merupakan penyerasian yang teratur dalam usaha-usaha untuk menyiapkan jumlah yang cocok menurut mestinya, waktu dan pengarahannya pelaksanaan hingga menghasilkan tindakan-tindakan harmonis dan terpadu menuju sasaran yang telah ditentukan”. Menurut Handayani (dalam Moekijat, 1994:42) ciri-ciri koordinasi adalah :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan;
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama;
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*);
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur;
- e. Konsep kesatuan tindakan;
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*).

Menurut Abdurachman (dalam Moekijat, 1994:37), prinsip-prinsip koordinasi antara lain :

- a. Prinsip efisiensi;
- b. Prinsip kesatuan arah dan tujuan (konvergensi);
- c. Prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan management dan pelaksanaan;
- d. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi;
- e. Prinsip dari koordinasi yang strategis.

Koordinasi sangat diperlukan oleh sebuah organisasi atau lembaga guna menyatukan tugas-tugas yang dari masing-masing unit kerja. Menurut Sugandha (dalam Moekijat, 1994:31) ada enam jenis koordinasi, yaitu koordinasi intern, koordinasi ekstern, koordinasi horizontal, koordinasi vertical, koordinasi diagonal, dan koordinasi fungsional. Menurut Sugandha (Moekijat, 1994:31) “koordinasi

ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi”. Organisasi merupakan wadah kegiatan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi anggotanya agar mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Dimock (dalam Handyaningrat, 1984:42) “organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Koordinasi horizontal menurut Tosi dan Carrol (dalam Moekijat, 1994:29) adalah “pengembangan hubungan yang lancar di antara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama”. Sedangkan menurut Sugandha (dalam Moekijat, 1994:31), koordinasi horizontal adalah “koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat”.

Menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39), ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu :

1. Hubungan langsung

Mary Parker Follet mengatakan bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab. melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada,

dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

2. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana menjadi lebih mudah.

3. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

4. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain, koordinasi itu jangan kaku.

5. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik diantara kepala-kepala bagian.

Pelaksanaan pekerjaan dan yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi. Disarankan

agar semua bagian yang saling berhadapan dapat dipercayakan kepada seorang atasan bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih baik.

7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantar pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya, dapat dibicarakan.

9. Kepemimpinan dan supervise yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervise. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

Dari 9 syarat tersebut peneliti hanya mengkaji 2 syarat yaitu komunikasi dan kepemimpinan.

1. Komunikasi

Pada prinsipnya manusia tidak akan pernah bisa lepas dari komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan dan memegang peranan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, komunikasi berfungsi sebagai alat pemersatu dalam sebuah komunitas. Seperti yang dikemukakan Tannen (dalam Suprpto, 2011:3), bahwa “kita butuh saling berdekatan agar merasa berada dalam suatu komunitas dan tidak merasa sendirian di dunia”.

Menurut Kincaid (dalam Hasan, 2005:17), “komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin (dalam Hasan, 2005:18) yang mengatakan bahwa, “komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang yang berinteraksi”. Sementara Winnet (dalam Suprpto, 2011:6), mengemukakan bahwa “komunikasi merupakan proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima, proses tersebut merupakan suatu rangkaian seri aktivitas, rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan peralihan maksud tersebut”.

Adanya komunikasi maka antara manusia satu dengan yang lainnya bisa saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dalam suatu kelompok. Menurut Hasan (2011:22) fungsi komunikasi, yaitu :

- a. mencapai pengertian satu sama lain;
- b. membina kepercayaan;
- c. mengkoordinir tindakan;

- d. merencanakan strategi;
- e. melakukan pembagian kerja;
- f. melakukan aktivitas kelompok; dan
- g. berbagi rasa.

- e. Memimpin orang-orang;
- f. Mengutamakan hirarki, menyebar suatu otoritas.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengarahkan dan menguasai orang lain sehingga membuat orang lain tunduk dan patuh bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu atau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berbicara kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dua unsur yaitu, yang dipimpin dan yang memimpin. Kedua unsur tersebut saling berhubungan, pemimpin mempunyai kuasa untuk mempengaruhi yang dipimpin dan yang dipimpin harus tunduk dan taat terhadap pemimpin.

Menurut Terry (dalam Kartono, 2011:57) “kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok”. Hal senada disampaikan oleh Tead (dalam Kartono, 2011:57) berpendapat bahwa “kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan (Kartono, 2011:153).

Menurut Panikkan (dalam Pasolong, 2008:13) mengatakan kepemimpinan yang baik adalah :

- a. Memberi tekanan/fokus pada masa depan;
- b. Menekankan atau fokus pada penentuan arah;
- c. Pertanyaan selalu “apa yang akan terjadi”;
- d. Memberi visi dan Inspirasi;

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan paradigma kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah penelitian seperti: melakukan penelitian pendahuluan, membuat rencana penelitian, pengamplan data primer dan sekunder, menganalisis data yang diperoleh dan menyusun skripsi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi dokumentasi. Lokasi penelitian di desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan subjek penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa, Ketua BPD dan anggota BPD.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Teknik keabsahan data adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini menggunakan minimal tiga sumber dalam menguji kredibilitas data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa terutama dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :

a. Komunikasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidas belum maksimal, kondisi saat ini pemerintahan desa hanya melanjutkan pemerintahan yang lama artinya posisi yang mereka tempati sekarang seperti Kepala Desa dan Ketua BPD sekedar formalitas belaka. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka diwarnai hubungan yang kurang sehat dan harmonis. Di dalam melaksanakan tugasnya mereka jarang sekali melakukan komunikasi, antara Kepala Desa dan BPD seolah berjalan sendiri-sendiri padahal posisi mereka sebagai satu kesatuan pemerintahan desa yang saling melengkapi. Intensitas komunikasi yang masih kurang mengakibatkan ketidak sinkronan antara program kerja di antara kedua belah pihak. Kendala yang dialami dalam komunikasi tersebut yakni tidak transparannya Kepala Desa dalam setiap penganggaran terutama dalam penyusunan dan penetapan APBDes. Kehadiran BPD, bagi Kepala Desa seolah-olah sebagai saingan sehingga, pola hubungan yang seharusnya kemitra dan melengkapi berubah menjadi hubungan yang saling menjatuhkan serta cenderung menunjukkan keegoan dari Kepala Desa, hal ini menyebabkan komunikasi yang dilakukan terlihat belum efektif.

b. Kepemimpinan

Keberhasilan suatu Desa dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak bisa terlepas dari kepemimpinan Kepala Desa dan BPD.

Kepemimpinan Kepala Desa dan BPD di Desa Sidas belum optimal. Kepemimpinan yang dipertunjukkan belum tegas dan belum mampu bekerjasama dalam melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat serta belum bisa menjadi contoh bagi bawahan mereka serta belum mampu mempengaruhi dan mengarahkan atau member tekanan kepada bawahannya. Dominasi dari Kepala Desa yang tidak memberi ruang gerak kepada Ketua BPD, sehingga membuat Ketua BPD tidak duk terhadap setiap kebijakan yang diambil Kepala Desa. Ditambah lagi kurangnya keterampilan yang dimiliki Kepala Desa dan BPD serta rendahnya tingkat pendidikan mereka, hal ini membuat kurangnya kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka terutama dalam penyusunan dan penetapan APBDes di Desa Sidas. Minimnya diklat kepemimpinan yang diikuti oleh Kepala Desa dan BPD berdampak pada rendahnya kemampuan mereka, sehingga ketidakmengertian mereka didalam bekerjasama dan berkoordinasi dalam penyusunan dan penetapan APBDes.

c. Keterbatasan Studi

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini belum sempurna, karena dalam pelaksanaannya, penelitian ini dihadapkan pada berbagai keterbatasan, yaitu keterbatasan waktu penelitian yang hanya sekitar dua minggu. Padahal untuk penelitian metode kualitatif, pada dasarnya dua minggu merupakan waktu yang sangat singkat meskipun akhirnya informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dirasakan cukup untuk menyelesaikan skripsi ini. Keterbatasan literatur, yang sesuai dengan objek atau permasalahan yang ada di lapangan, tidak tersedianya data-data di

kantor desa, seperti monografi desa dan data lainnya relevan dengan objek penelitian, serta sulitnya menemui para aparatur desa yang merupakan narasumber dari penelitian tersebut, selama penulis melakukan penelitian, kantor desa selalu tutup.

d. Apresiasi

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Sidas dan Badan Permusyawaratan Desa Sidas yang telah bersedia memberikan izin dan bantuan kepada saya dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Perspektif Baru Dalam Pengelolaan Pemerintahan*. Jakarta: Millenium Publisher.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayaningrat, Soewarno. 1984. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hariyono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.

Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Narbuko, Cholid., Achmadi Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.

Nasehudin, Toto Syatori., Gozali Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

Safi, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suprpto, Tommy. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Peran Manajemen dalam Komunikasi*. Jakarta: Buku Seru.

B. Peraturan Perundang-undangan / Dokumen :

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa.

C. Rujukan Elektronik :

<http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikator-pembangunan-daerah/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2013.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FERNANDO FAJAR
NIM / Periode lulus : E42009055/ 2013
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : fernandofajar89@gmail.com / 0852 4568 1133

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA
SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui 2/ 2014
Pengelola Jurnal IP.....
10



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Februari 2014

(FERNANDO FAJAR)